

Sirkuit Legitimasi dan Mutasi Diskursif dalam Wacana Swasembada Pangan: *Analisis Wacana Kritis pada Tiga Media Daring Nasional (2024–2026)*

Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
70-90

© The Author(s) 2026



Volume 23.1 Januari -Juni 2026

Publikasi online: 30 Juni 2026

<https://jisip.jurnaliisipjakarta.id>

Received: 20 April 2026

Revised: 21 Mei 2026

Accepted: 12 Juni 2026

DOI : 10.36451/jisip.v23i1.608

The Circuit of Legitimacy and Discursive Mutation in Food Self-Sufficiency Discourse : A Critical Discourse Analysis of Three National Online Media (2024-2026)

Asrul M Mustaqim¹ , Enny Suryanjari² , Linda Rahmah Yuliaty³ , Mieke Suharini⁴
Silvana Indriani Putri⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta

Corresponding author:

Asrul M Mustaqim, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Jalan Raya Lenteng Agung 32 Jakarta Selatan, Indonesia. Email: asrul.mustaqim@iisip.ac.id

Abstrak

Artikel ini melaporkan hasil penelitian tentang sirkuit legitimasi politik pangan rezim populis Prabowo Subianto periode 2024-2026 yang mengklaim akselerasi swasembada kilat di tengah trauma kegagalan historis proyek agraria skala besar. Melalui paradigma kritis model sosiokognitif

Teun A. van Dijk yang diintegrasikan dengan teori ekonomi politik pangan, penelitian kualitatif ini mengomparasi teks wacana induk negara dengan pemberitaan *Republika.co.id*, *Kompas.com*, dan *Detik.com*. Keabsahan hasil penelitian ditunjukkan dengan menggunakan prinsip *historical situatedness* makroglobal, yaitu mencocokkan temuan penelitian dengan konteks historis yang berlaku sedangkan pada level teks dilakukan *audit trail*. Hasil penelitian membuktikan adanya penyederhanaan logika populis yang mereduksi ketahanan pangan menjadi swasembada beras statistik. Hegemoni rezim mengalami pembelahan (*fractured hegemony*) akibat benturan material dengan dugaan anomali iklim ekstrem “El Nino Godzilla” dan geopolitik global. Implikasi teoretis riset ini melahirkan kebaruan konsep mengenai Mutasi Diskursif, yaitu kekuasaan populis sekuat apa pun pada akhirnya melunakkan janji hulu mereka demi tunduk pada batasan ekologis alam dan realitas ekonomi tingkat bawah.

Kata Kunci

Analisis Wacana Kritis; Mutasi diskursif; Politik pangan; Sirkuit legitimasi; Swasembada pangan

Abstract

This article reports on the results of a study that examines the legitimacy of food politics under Prabowo Subianto's populist regime (2024-2026). The regime claimed that Indonesia could achieve rapid food self-sufficiency, despite the historical failures of large-scale agrarian projects. Using Teun A. van Dijk's sociocognitive model of Critical Discourse Analysis, integrated with the political economy of food, this qualitative study compares the state's master discourse with news coverage published by Republika.co.id, Kompas.com, and Detik.com. The trustworthiness of the findings was established through the principle of macro-global historical situatedness, by aligning the findings with the prevailing historical context, and was further supported by an audit trail at the textual level. The results reveal a reductionist populist logic that limits the multidimensional concept of food security to merely achieving statistical rice self-sufficiency. Additionally, the study shows that the regime's legitimacy circuit evolved into a fractured hegemony, as counter-media outlets exposed the contradictions between political promises, the extreme El Niño “Godzilla” climate anomaly, and global geopolitical pressures. This study introduces a novel concept called “Discursive Mutation,” which explains how populist power adapts its original political promises in response to ecological constraints and the economic realities experienced at the grassroots level.

Keywords

Circuit of Legitimation; Critical Discourse Analysis; Food Politics; Discursive Mutation; Food Self-Sufficiency

Pendahuluan

Ketahanan pangan telah bergeser dari sekadar isu agrikultur teknis menjadi instrumen politik krusial dalam membangun legitimasi kekuasaan di Indonesia. Dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan ambisi untuk mencapai kemandirian pangan dalam

kurun waktu empat tahun (Prabowo, 2024). Secara retorik, pernyataan ini merupakan bentuk *rhetoric of resilience* yang dirancang untuk memberikan rasa aman nasional. Namun, ambisi ini memicu perdebatan karena dianggap mengabaikan kompleksitas struktural. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa luas panen padi terus mengalami tren penurunan, dari 10,41 juta hektar pada 2022 menjadi hanya 10,20 juta hektar pada 2023 (BPS, 2024). Penurunan luas lahan ini, yang disertai tingginya laju konversi lahan pertanian menjadi area industri dan permukiman sebesar 100.000 hektar per tahun, menjadi hambatan empiris utama yang membuat target empat tahun tersebut dipertanyakan secara teknis (Pasaribu, 2023).

Analisis retorika terhadap pidato tersebut dapat dibedah melalui segitiga retorik Aristoteles. Prabowo menggunakan *ethos* dengan memosisikan dirinya sebagai pemimpin yang tegas, serta *pathos* untuk menyentuh sentimen nasionalisme. Namun, aspek *logos* dalam pidato tersebut menjadi titik lemah. Penentuan target “empat tahun” dipandang oleh banyak pakar sebagai narasi yang lemah secara empiris karena tidak didukung data yang memadai. Pakar ekonomi pertanian berpendapat bahwa tantangan sistemik seperti konversi lahan yang masif, perubahan iklim, hingga inefisiensi birokrasi membuat target swasembada dalam empat tahun menjadi nyaris mustahil secara teknis (Fadhli & Siregar, 2023). Pakar ekonomi dari *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) mencatat bahwa ketergantungan impor pangan Indonesia masih sangat tinggi; misalnya, impor beras pada tahun 2023 melonjak hingga 3,06 juta ton akibat dampak El Nino dan inefisiensi produksi domestik (INDEF, 2024). Kesenjangan antara target swasembada dan realitas ketergantungan impor ini menciptakan apa yang disebut sebagai *discursive gap*.

Menurut perspektif *Critical Discourse Analysis* (CDA), retorika ketahanan kerap digunakan sebagai alat “populismepangan” untuk memenangkan dukungan massatanpa mempertimbangkan keberlanjutan kebijakan jangka panjang (Scoones et al., 2018). Dalam konteks Indonesia, ambisi serupa pada masa pemerintahan sebelumnya berakhir pada kegagalan, seperti pada proyek *Food Estate* yang justru berdampak pada kerusakan ekologis (Kurnia et al., 2022). Dalam era media baru, *rhetoric of resilience* diproduksi melalui media daring sebagai infrastruktur utama sirkuit ini, yang berperan mengamplifikasi aspek *pathos* dari pidato tersebut sehingga menciptakan sentimen harapan di tingkat kognisi masyarakat. Melalui mekanisme *gatekeeping* dan kontrol akses wacana (van Dijk, 2015), sirkuit diskursif ini cenderung meminggirkan narasi kontra-hegemoni dari para pakar yang mencoba memasukkan realitas empiris ke dalam percakapan publik. Konsep “Sirkuit Diskursif” (*discursive circuit*) memiliki akar kuat dalam studi budaya dan komunikasi, terutama yang dikembangkan oleh Richard Johnson (1986) dalam tulisannya *The Circuit of Culture*. Konsep ini kemudian dievolusikan oleh tokoh seperti Stuart Hall untuk menjelaskan bagaimana makna diproduksi, disebarkan melalui media, dan dikonsumsi oleh publik hingga menjadi sebuah kebenaran kolektif.

Posisi media dalam sirkuit diskursif menimbulkan konsekuensi bahwa diskursus media tidak lagi berfungsi sebagai ruang verifikasi, melainkan sebagai alat penguat jangkar legitimasi bagi

rezim yang baru dilantik. Dalam konteks ini, persoalannya adalah bagaimana sirkuit diskursif mampu menormalisasi janji yang secara saintifik mustahil guna mengamankan konsensus publik di awal masa jabatan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk membedah bagaimana putaran wacana antara teks pidato dan media daring mampu mengonstruksi hegemoni di tengah tantangan kedaulatan yang nyata.

Meskipun banyak studi telah membahas kebijakan pangan dari perspektif teknokratis, seperti studi tentang efektivitas subsidi pupuk (Rusono et al., 2021) atau evaluasi mekanisasi pertanian (Hidayat, 2022), sedikit yang membedah bagaimana retorika politik digunakan sebagai strategi komunikasi untuk mengatasi skeptisisme publik. Penelitian sebelumnya oleh Kurnia et al. (2022) telah mengevaluasi kegagalan proyek *Food Estate* di Kalimantan Tengah, namun studi tersebut lebih fokus pada dampak ekologis ketimbang konstruksi wacananya. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap bagaimana janji “empat tahun” dikonstruksi sebagai kebenaran politik di tengah hambatan biofisik dan ekonomi yang nyata. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana diskursus ketahanan pangan digunakan untuk memperkuat hegemoni kekuasaan di tengah tantangan kedaulatan yang nyata.

Sebagai penelitian yang berakar pada paradigma kritis, penulis menyadari bahwa pemilihan diksi bukanlah tindakan yang netral, melainkan bagian dari praktik wacana itu sendiri. Istilah “rezim” dipergunakan bukan sebagai stigma politik terhadap pemerintahan, melainkan sebagai kategori analitis dalam tradisi *Critical Discourse Analysis* dan ekonomi politik pangan. Dalam kerangka ini, “rezim” merujuk pada konfigurasi relasi kuasa, aktor kebijakan, dan aparatus diskursif yang memproduksi serta menstabilkan suatu tatanan makna—sejajar dengan penggunaan istilah *food regime* (McMichael, 2016). Penulis secara reflektif menempatkan diri pada posisi kritis terhadap konsentrasi kuasa diskursif, dan penggunaan diksi ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi konseptual, bukan untuk menyampaikan penghakiman ideologis yang tendensius.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian yang ringkas dan terfokus pada periode kajian 2024–2026: (1) Bagaimana retorika ketahanan pangan Prabowo Subianto dikonstruksi secara populis untuk membangun hegemoni kekuasaan pada periode 2024–2026? (2) Bagaimana narasi “jangkar legitimasi” dioperasikan melalui sirkuit media daring untuk menjustifikasi janji swasembada yang bertentangan dengan data dan analisis pakar pada periode tersebut?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dibangun kerangka teoritik yang berpijak pada integrasi teori sosiokognitif dan ekonomi politik diskursif serta teori untuk membedah bagaimana kekuasaan dikonsolidasikan melalui narasi. Bagian ini mesintesis konsep-konsep inti yang menjadi pisau analisis, yang kemudian dioperasikan dalam tiga pilar kerangka analitis.

1. Hegemoni, Jangkar Legitimasi, dan Retorika Populis Pangan

Dalam perspektif Gramscian, hegemoni bukan sekadar dominasi fisik, melainkan

kepemimpinan moral dan intelektual yang disetujui rakyat secara sukarela melalui pembentukan *common sense* (Pratt, 2021). Dalam konteks kepemimpinan baru, jangkar legitimasi berfungsi sebagai titik tumpu awal untuk mengamankan persetujuan publik. Janji swasembada pangan yang drastis bertindak sebagai “jangkar” yang menambatkan ekspektasi publik pada figur pemimpin, sehingga kegagalan teknokratis di masa depan dapat diredam oleh kepercayaan ideologis yang telah terbangun di awal (Clapp & Moseley, 2020).

Untuk meredam kegagalan teknokratis tersebut, biasanya digunakan retorika populis dan retorika pangan. Retorika populis digunakan sebagai instrumen untuk menyederhanakan realitas yang kompleks. Menurut Mudde dan Kaltwasser (2017), populisme menciptakan dikotomi antara “rakyat yang murni” dan “elit yang korup/skeptis.” Retorika pangan (seperti target empat tahun) dikonstruksi secara populis untuk membingkai kedaulatan pangan sebagai perjuangan nasionalis. Retorika ini mengesampingkan argumen ilmiah para pakar—yang diposisikan sebagai hambatan elit/birokratis—dan menggantinya dengan narasi tekad politik (*political will*).

Diskursus pangan yang terbangun merupakan medan kognisi yang di dalamnya beredar berbagai pengetahuan elit politik dan publik. Diskursus pangan tidak hanya dipahami sebagai pertukaran informasi mengenai komoditas, tetapi sebagai arena konstruksi pengetahuan. Melalui kognisi sosial (van Dijk, 2016, pp. 60–63), diskursus pangan diatur untuk membentuk skema mental di masyarakat bahwa ketahanan nasional identik dengan ketegasan pemimpin. Janji swasembada diproduksi untuk mengisi memori kolektif masyarakat tentang kejayaan agraris masa lalu, sehingga menciptakan harapan yang mengabaikan batasan empiris.

Dalam hal ini, media menjadi wahana diskursus sebagai amplifikasi sekaligus kontrol akses. Diskursus media berperan sebagai infrastruktur komunikasi yang memediasi teks pidato ke ruang publik. Media bukan saluran netral; melalui mekanisme *gatekeeping* dan kontrol akses (van Dijk, 2015), media menentukan apakah narasi jangkar legitimasi tersebut diamplifikasi sebagai kebenaran (pro-hegemoni) atau dikritisi melalui penyediaan ruang bagi narasi kontra-hegemoni dari para ahli. Sentimen media dalam periode Oktober 2024 hingga April 2026 menjadi indikator sejauh mana hegemoni diskursif pemerintah berhasil menundukkan skeptisisme publik.

Dalam satu dekade terakhir, diskursus pangan telah bergeser dari sekadar manajemen sumber daya menjadi arena kontestasi kekuasaan. Scoones et al. (2018) mengidentifikasi munculnya “populisme otoriter”. Pemimpin politik menggunakan janji swasembada yang heroik untuk membangun ikatan emosional dengan rakyat sekaligus meredam kritik teknokrasi. Dalam konteks ini, pangan diposisikan sebagai *empty signifier*—sebuah simbol kosong yang dapat diisi dengan harapan nasionalisme, kedaulatan, dan harga diri bangsa (Laclau, 2005). Secara teoretik, retorika “mandiri pangan dalam empat tahun” yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dapat dipahami melalui lensa hegemoni Antonio Gramsci. Hegemoni bekerja dengan membangun *common sense* di tengah masyarakat bahwa swasembada adalah “keharusan sejarah” yang hanya bisa dicapai melalui kepemimpinan yang kuat (Pratt, 2021). Retorika populis di sini berperan

menyederhanakan persoalan pertanian yang kompleks (seperti kegagalan pasar, krisis iklim, dan konflik agraria) menjadi narasi sederhana, yakni “keinginan politik yang kuat” (*political will*).

Lebih jauh, studi Canovan (2005) mengenai gaya retorika populis menekankan adanya dikotomi antara “elit yang skeptis” (para ahli dan akademisi yang meragukan target empat tahun) dengan “rakyat yang membutuhkan solusi cepat.” Dengan menetapkan target waktu yang ambisius namun secara empiris sulit dicapai, pemimpin populis sebenarnya sedang melakukan politik legitimasi. Menurut Mudde dan Kaltwasser (2017), janji semacam ini tidak dimaksudkan untuk diuji secara saintifik, melainkan untuk menciptakan mobilisasi dukungan dan rasa urgensi (*sense of urgency*) yang membenarkan konsolidasi kekuasaan di awal masa jabatan. Inilah celah teoretik utama: bagaimana retorika ketahanan pangan berfungsi bukan sebagai peta jalan kebijakan (*policy roadmap*), melainkan sebagai mekanisme hegemoni untuk mengamankan persetujuan publik di tengah keraguan para ahli.

2. Kerangka Analitis Tiga Pilar

Kerangka teoretis ini dibangun sebagai pisau analisis terpadu untuk membedah bagaimana retorika ketahanan pangan dikonstruksikan, diamplifikasi, dan dinegosiasikan di ruang media massa. Alur epistemologis kerangka ini bergerak dari struktur material kebijakan, menuju strategi kognisi media, hingga bermuara pada dinamika sirkuit legitimasi di tingkat makro sosial.

Pilar Pertama: Ekonomi Politik Pangan sebagai Instrumen Falsifikasi

Pilar pertama bersandar pada teori ekonomi politik pangan untuk memetakan kondisi material dan agro-klimatologi yang melatari lahirnya wacana. Kebijakan pangan di negara berkembang sering kali terjebak dalam utopia swasembada yang mengutamakan ambisi politik jangka pendek daripada kalkulasi teknokratis yang berkelanjutan (Santosa, 2021). Proyeksi swasembada berskala besar (*megaprojects*) berorientasi monokultur umumnya digunakan negara untuk memaksakan kapitalisasi lahan dan perluasan fungsi aparatus keamanan ke sektor agraria sipil (Davidson, 2018; Li, 2014). Secara operasional, ekonomi politik pangan digunakan sebagai instrumen falsifikasi objektif, yakni memetakan variabel pembatas riil—anomali iklim ekstrem Super El Nino, kelambatan penyerapan anggaran fiskal, ketergantungan input global, hingga konflik agraria di tingkat tapak (Neilson & Wright, 2023; Suryana, 2022). Variabel-variabel material inilah yang dalam analisis van Dijk ditempatkan sebagai “konteks sosial” (dimensi makro) yang akan membentur, menguji, dan memutus batasan rasionalitas dari teks selebrasi yang diproduksi penguasa.

Pilar Kedua: Populisme Pangan dan Sirkuit Legitimasi

Pilar kedua membedah dimensi makro-konteks mengenai bagaimana kekuasaan populis mengonstruksikan dan mempertahankan keabsahannya. Pemimpin populis mengoperasikan

“populisme pangan” (*food populism*) sebagai strategi diskursif untuk memobilisasi afeksi massa melalui penyederhanaan logika (*populist logical reductionism*) yang distortif (Borras Jr., 2020; Mudhoffir, 2021). Isu ketahanan pangan (*food security*) yang multidimensional secara sengaja dipersempit (*discursive narrowing*) menjadi sekadar swasembada beras statistik berskala makro demi menciptakan efek kejut keberhasilan kilat (Scoones et al., 2022). Untuk mengamankan kepatuhan publik atas reduksi logis tersebut, rezim menggerakkan sirkuit legitimasi melalui dua mekanisme utama (Suchman, 1995; van Dijk, 2015):

- *systemic omission* (pengabaian sistemik): mensterilkan wacana resmi dari data kegagalan struktural dan gesekan lapangan;
- *ideological discourse strategy* (strategi wacana ideologis): memproduksi teks triumfalistik yang berlebihan, manipulasi *logos* angka makro, serta penggunaan metafora simbolik-kultural untuk melakukan penutupan wacana (*discursive closure*) dari kritik oposisi.

Kerangka ini berfungsi melacak kronologi sirkuit legitimasi dari fase hulu (penanaman janji), fase operasional (reparasi gesekan), hingga fase hilir (proklamasi selebrasi).

Pilar Ketiga: Model Mental Redaksi dan Kognisi Sosial Media

Pilar ketiga bertindak sebagai jembatan meso (kognisi sosial) yang menjelaskan bagaimana teks media diproduksi berdasarkan model mental redaksi. Media massa tidak pernah menjadi penyalur informasi yang steril, melainkan medan kontestasi relasi kuasa. Ketika kepemilikan media bersinggungan secara struktural dengan elite kabinet, ruang redaksi akan mengembangkan model mental “jurnalisme afiliatif” (McChesney, 2015) yang menyelaraskan strukturnya dengan wacana triumfalistik penguasa dan bertindak sebagai tameng defensif untuk menenteramkan publik (*reassurance*) dari ancaman krisis (Habermas, 2016). Sebaliknya, perlawanan terhadap hegemoni digerakkan oleh model mental “jurnalisme deliberatif.” Menggunakan tesis Castells (2017), jurnalisme deliberatif memanfaatkan komunitas akademik dan data sains sebagai penentu definisi utama (*primary definers*) untuk membongkar kepalsuan wacana elite. Di antara kedua kutub tersebut, media digital komersial harian beroperasi di bawah logika ekonomi pasar (*clickbait economy*) yang membelah wacana secara oportunistik demi komodifikasi konflik (Fuchs, 2021).

Melalui penyatuan tiga pilar ini, analisis sosiokognitif diharapkan tidak lagi sekadar memetakan teks, melainkan mampu membongkar fenomena kebaruan teoretis yang disebut “Mutasi Diskursif.” Kerangka ini menyediakan landasan untuk melihat bagaimana jurnalisme sains deliberatif memfalsifikasi utopia statistik penguasa, memecah kemurnian hegemoni rezim (*fractured hegemony*), dan dapat memengaruhi kekuasaan populis untuk melunakkan serta merekonstruksi janji hulu mereka agar tunduk pada batas ekologis alam dan realitas “meja makan rakyat” di tingkat bawah. Keseluruhan kerangka teoritik tiga pilar sirkuit legitimasi pangan populus (Gambar 1) merupakan alur epistemologis dari struktur material ke kognisi media dan konteks makro Van Dijk.



Gambar 1: Kerangka Analisis sirkuit legitimasi pangan

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) model sosiokognitif yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk. Pemilihan metode ini didasarkan pada argumentasi bahwa wacana tidak dapat dipahami hanya melalui struktur teks semata, melainkan harus dikaitkan dengan kognisi sosial dan konteks kekuasaan yang melingkupinya (van Dijk, 2015). Dalam konteks retorika politik, model van Dijk memungkinkan peneliti membongkar bagaimana teks pidato diproduksi oleh aktor kekuasaan dan kemudian direproduksi oleh media daring untuk membentuk persepsi publik (kognisi) yang mendukung hegemoni tertentu.

Objek penelitian ditempatkan dalam kerangka sirkuit diskursif (*discursive circuit*) untuk melihat dinamika produksi dan sirkulasi makna (Johnson, 1986). Korpus data primer terdiri atas naskah pidato pelantikan Presiden Prabowo Subianto (20 Oktober 2024) dan rilis resmi Kementerian Sekretariat Negara (7 Januari 2026). Data sekunder berupa teks pemberitaan media daring pada periode Oktober 2024 hingga Maret 2026 yang dikumpulkan dari tiga portal berita nasional: *Republika.co.id*, *Kompas.com*, *Detik.com*. Ketiga media dipilih secara *purposive* karena merepresentasikan spektrum ideologi media yang berbeda—moderat (*detik.com*), kritis (*kompas.com*), dan media yang dekat dengan lingkaran kekuasaan (*Republika.co.id*)—yang krusial untuk memetakan bagaimana hegemoni diskursif bekerja di ruang publik (Hall, 1997).

Keseluruhan artikel berita yang diteliti pada fase hulu, secara *purposive* berdasarkan ketersediaan berita yang bertema ketahanan pangan, yaitu masing masing media tiga berita. Untuk fase proses masing masing media diteliti lima artikel/artikel dan fase ahir (evaluasi)

masing-masing media tiga berita. Seluruh teks yang dianalisis baik naskah pidato presiden dan berita aktual yang diteliti dapat diverifikasi secara daring. Untuk menjamin keterlacakan empiris (*verifiability*), teks berita dan tautan URL yang dapat dibaca melalui *hyperlink*.

Analisis data dilakukan melalui tiga level yang saling berhubungan sebagaimana disarankan dalam model sosiokognitif (van Dijk, 2016, pp. 64–67). Level pertama, analisis teks dimulai analisis struktur makro tematik, kedua level superstruktur meso teks, untuk melihat struktur teks (mikro). Tahap ini membedah elemen tekstual meliputi leksikon, sintaksis, dan retorika. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi penggunaan diksi populis dan gaya retorika pangan yang bertujuan membangun *pathos* nasionalisme guna menjustifikasi target swasembada empat tahun.

Penelitian ini memperlakukan seluruh leksikon yang termuat dalam draf teks berita—termasuk kutipan langsung dari Presiden maupun pejabat teknis—bukan sekadar sebagai reproduksi verbal yang netral. Berdasarkan prinsip kognisi sosial, ketika institusi media memilih untuk mengangkat, menyaring, dan mengartikulasikan leksikon sporal-spasial, seperti ‘lambung desa’ atau ‘lambung kecamatan’, kata-kata tersebut telah bertransformasi menjadi struktur mikropembingkaian (*framing*) yang aktif. Melalui operasionalisasi leksikon tersebut, media secara sadar ikut mengonstruksikan, menggeser batas-asumsi realitas politik pangan di tingkat massa (Shoemaker & Reese, 2014; Van Dijk, 2015).

Level kedua merupakan Analisis Kognisi Sosial (Meso), yaitu tahap menganalisis proses produksi teks. Peneliti mengeksplorasi bagaimana skema mental dan ideologi produsen wacana (Presiden dan jurnalis media) memengaruhi konstruksi berita. Dalam dimensi kognisi sosial, penelitian ini membedah bagaimana model mental produsen wacana—baik Presiden sebagai sumber pertama maupun jurnalis media sebagai distributor—berinteraksi dalam menyusun representasi sosial mengenai kemandirian pangan. Mengikuti proposisi Van Dijk (2016), kognisi sosial bertindak sebagai filter yang menentukan bagaimana data empiris yang skeptis diubah menjadi narasi optimisme populis. Argumentasi ini didukung oleh pemikiran bahwa teks adalah hasil dari representasi mental kelompok sosial yang dominan (Wodak & Meyer, 2016). Ketiga, analisis Konteks Sosial (Makro) menghubungkan temuan tekstual dengan realitas kekuasaan dan upaya pembangunan hegemoni. Tahap ini bertujuan mengungkap bagaimana narasi pangan berfungsi sebagai jangkar legitimasi yang menormalisasi ambisi politik di atas realitas empiris. Tahap analisis dilakukan dengan mengevaluasi praktik hegemoni melalui kontrol akses wacana. Hal ini dilakukan dengan memetakan aktor-aktor yang dominan dalam pemberitaan media daring periode Oktober 2024 sampai Maret 2026, guna mengungkap bagaimana struktur kekuasaan memanfaatkan sirkuit diskursif untuk memarginalkan kritik pakar dan mengukuhkan legitimasi rezim melalui isu kedaulatan pangan.” Pada level ini, penelitian ini mengevaluasi praktik hegemoni melalui kontrol akses wacana. Hal ini dilakukan dengan memetakan aktor-aktor yang dominan dalam pemberitaan media daring periode Oktober –

Maret, guna mengungkap bagaimana struktur kekuasaan memanfaatkan sirkuit diskursif untuk memarjinalkan kritik pakar dan mengukuhkan legitimasi rezim melalui isu kedaulatan pangan.” Dalam penulisannya, dimensi kognisi sosial dan konteks sosial diintegrasikan untuk memudahkan menginterpretasi keterkaitan kedua konteks tersebut dalam satu media.

Dalam penelitian yang berakar pada paradigma kritis ini, ukuran mutu dan keabsahan analisis (*goodness of quality research*) bersandar pada prinsip kesesuaian keberadaan historis atau *historical situatedness* (Guba, Egon G and Lincoln, 2005). Pemilihan prinsip ini sah dan memadai dalam tradisi AWK karena tujuan epistemik penelitian kritis bukanlah generalisasi statistik atau replikabilitas, melainkan kedalaman interpretasi atas relasi kuasa; keabsahan dengan demikian dinilai dari sejauh mana interpretasi teks berakar pada dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap konteks struktural-historis yang nyata, bukan dari konvergensi sumber yang seragam.

Meskipun demikian, untuk memperkuat konfirmabilitas (*confirmability*) dan menghindari subjektivitas interpretatif, penelitian ini pada level teks menambahkan prosedur pelengkap, yaitu dilakukan pelacakan audit (*audit trail*) atas keseluruhan proses reduksi dan kategorisasi data sehingga jejak penafsiran dapat ditelusuri ulang. Validitas interpretasi kemudian dicapai dengan membenturkan secara dialektis anatomi sirkuit kebahasaan mikro, meso, dan makro media dengan dinamika hukum pasar dunia dan batas-batas ekologis alam yang nyata terjadi dalam ruang sejarah riil (Moore, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Analisis dimensi teks model Teun A. van Dijk dipecah secara kronologis ke dalam tiga fase strategis untuk menangkap dinamika akomodasi wacana rezim yang merefleksikan titik balik sirkuit legitimasi dari ketiga media (*Republika.co.id*, *Kompas.com*, *Detik.com*) dan wacana induk negara.

1. Fase Hulu: Penanaman Jangkar Legitimasi (Oktober–Desember 2024)

Fase ini merupakan ruang pembentukan hegemoni awal bahwa rezim menanamkan jangkar legitimasi politik pangan yang bersifat absolut dan ofensif untuk mengunci kepatuhan publik.

Tabel 1. Matriks Struktur Teks Fase Hulu (Oktober –Desember 2024)

Subjek Wacana	Struktur Makro (Tema Utama)	Superstruktur (Skema/ Alur)	Struktur Mikro (Elemen Tekstual)
Wacana Resmi Negara Pidato Presiden	Sekuritisasi pangan di tengah krisis global dan justifikasi komando swasembada mutlak.	Skema pengondisian krisis (<i>fear appeal</i>) untuk mengunci kepatuhan birokrasi di tingkat hulu.	- Leksikon: “keadaan genting”, “ancaman invasi”, “lambung pangan dunia”. - Sintaksis: “Dalam krisis... tidak ada yang mengizinkan barang mereka kita beli.”

Subjek Wacana	Struktur Makro (Tema Utama)	Superstruktur (Skema/ Alur)	Struktur Mikro (Elemen Tekstual)
Media <i>Republika.co.id</i> Berita 1 Berita 2 Berita 3	Amplifikasi linier maklumat Presiden dan konsolidasi awal kementerian teknis.	Skema pelegitimasi kabinet hulu melalui penyebaran instruksi fisik cetak sawah.	• Leksikon: “menekankan tentang target”, “garis strateginya”, “bergerak cepat”. • Retoris: “Masa depan Indonesia itu ada di Papua.”
Media <i>Kompas.com</i> Berita 1 Berita 2 Berita 3	Falsifikasi historis-agraria dan penolakan terhadap utopia proyek ketahanan pangan.	Skema dekonstruksi janji hulu lewat pembeberan data kegagalan investasi masa lalu.	• Leksikon: “utopia swasembada”, “tak efisien”, “mengalami kegagalan”. • Komparatif: Proyek <i>Food Estate</i> era SBY & Jokowi “mangkrak dan defisit perdagangan.”
Media <i>Detik.com</i> Berita 1 Berita 2 Berita 3	Penelanjangan friksi biaya produksi lokal dan pembongkaran opsi impor darurat.	Skema interupsi target kabinet melalui eksploitasi data krisis manajemen tani (<i>clickbait</i>).	• Leksikon: “tidak mudah”, “krisis manajemen”, “kredit merepotkan”. • Kontras: Target 4 tahun vs biaya beras RI “dua kali lipat dari Vietnam” & opsi impor 1 juta ton.

Teks induk negara menanamkan hegemoni awal menggunakan strategi pengondisian ketakutan (*fear appeal*) dan romantisasi sejarah, membingkai pangan sebagai domain pertahanan eksistensial melalui frasa “*dalam keadaan genting... tidak ada jalan lain.*” Pada tahap awal ini, pembelahan diskursif antarmedia belum terbuka lebar; *Detik.com* terbukti masih berjalan sejalan dengan *Kompas* untuk meluncurkan skeptisisme radikal terhadap maklumat swasembada kilat rezim. *Kompas* bergerak dari koridor jurnalisme sains deliberatif dengan memfalsifikasi janji hulu melalui pengungkapan sejarah hitam proyek komoditas pangan (“*Food Estate Merauke mangkrak*”). Sementara itu, *Detik.com* memperkuat posisi kritis tersebut melalui perspektif jurnalisme pasar yang mengeksploitasi kerapuhan manajemen tani. *Detik.com* memaparkan data kontrasif dari pakar UGM bahwa target pemerintah “*tentu tidak mudah*” mengingat biaya produksi beras domestik “*mencapai dua kali lipat dari Vietnam,*” sembari mengungkap kontradiksi hulu lewat pembongkaran opsi “*impor beras 1 juta ton*” oleh Bulog di akhir tahun 2024. Kontrastasi linier ini hanya dilawan oleh *Republika* yang bertindak sebagai media yang memiliki kedekatan politik dengan pemerintah melalui glorifikasi ruang berslogan “*Masa depan Indonesia ada di Papua.*”

2. Fase Operasional: Retakan Diskursif dan Gesekan Lapangan (2025)

Memasuki tahun 2025, wacana hulu ditarik ke ruang material dan mulai mengalami gesekan hebat ketika berbenturan dengan krisis iklim, realitas anggaran, dan konflik agraria.

Tabel 2. Matriks Struktur Teks Fase Operasional (Januari–Desember 2025)

Subjek Wacana	Struktur Makro (Tema Utama)	Superstruktur (Skema/Alur)	Struktur Mikro (Elemen Tekstual)
Wacana Negara	Sekuritisasi pangan komando dan pelibatan aparatus pertahanan di tingkat bawah	Skema penenteraman publik (<i>reassurance</i>) via instruksi mobilisasi militer-sipil.	• Leksikon: “<i>pelopor ketahanan pangan</i>”, “<i>gandeng petani</i>”, “<i>menjamin tidak ada deforestasi</i>”. • Sintaksis: “<i>Produksi meningkat karena intervensi cepat dan sinergi...</i>”
Media <i>Republika.co.id</i> Berita 1 Berita 2 Berita 3 Berita 4 Berita 5	Glorifikasi swasembada beras dan sinkronisasi agenda kementerian..	Amplifikasi linier tanpa celah skeptisisme terhadap klaim swasembada 2025.	• Leksikon: “<i>rekor stok tertinggi 20 tahun</i>”, “<i>bukan kebetulan</i>”, “<i>layanan adaptif KAI</i>”. • Retoris: “<i>Masa depan Indonesia ada di Papua.</i>”
Media <i>Kompas.com</i> Berita 1 Berita 2 Berita 3 Berita 4 Berita 5	Falsifikasi berbasis sains dan pembongkaran ketimpangan spasial Papua.	Skema dekonstruksi klaim hulu lewat data kinerja fiskal dan hak adat.	• Leksikon: “<i>kesenjangan sistemik</i>”, “<i>anggaran lambat (32,7%)</i>”, “<i>kriminalisasi petani benih</i>” • Komparatif: “<i>Papua terendah (40,21)... MIFEE mangkrak.</i>”
Media <i>Detik.com</i> Berita 1 Berita 2 Berita 3 Berita 4 Berita 5	Komodifikasi konflik agraria lokal dan ambiguitas transaksi impor.	Skema eksploitasi paradoks ekonomi demi sirkulasi pasar digital (<i>clickbait</i>).	• Leksikon: “<i>nabrak Undang-Undang</i>”, “<i>kebal hukum</i>”, “<i>340 ribu ton beras impor masuk</i>” • Kontras: Klaim sukses hutan pangan vs “<i>sawah diuruk pabrik</i>”.

Teks tiga media menunjukkan pemisahan posisi empiris. *Republika* mengambil peran afiliatif melalui penenteraman publik (*politics of reassurance*), menyerap klaim Kementan bahwa lonjakan stok “*bukan kebetulan, melainkan hasil kerja cepat*” serta melegitimasi sekuritisasi pangan melalui diksi “*Polri pelopor ketahanan pangan.*” Sebaliknya, *Kompas* meluncurkan jurnalisme sains deliberatif yang memutus hegemoni negara. *Kompas* menunjukkan kendala operasional melalui bukti lambatnya serapan anggaran yang “*baru mencapai 32,7 persen pada pertengahan tahun*” serta mengungkap ketimpangan spasial ekstrem bahwa “*Papua terendah dengan skor 40,21.*” Sementara, *Detik.com* bergerak pada koridor jurnalisme pasar digital yang oportunistik. Redaksi *Detik.com* mengomodifikasi friksi agraria di tingkat bawah melalui laporan kontradiktif “*Sawah di Madiun diuruk untuk pabrik mainan*” yang dinilai “*menabrak*

Undang-Undang, ” sekaligus mengekspos transaksi fisik kontrak “340 ribu ton beras impor” oleh Bulog di akhir tahun.

3. Fase Hilir: Proklamasi dan Interupsi (Awal 2026)

Fase ini merekam bagaimana rezim memproklamasikan pemenuhan janji politiknya, namun seketika terinterupsi oleh anomali pasar domestik dan krisis geopolitik global.

Tabel 3. Matriks Struktur Teks Fase Akhir (Januari–Maret 2026)

Subjek Wacana	Struktur Makro (Tema Utama)	Superstruktur (Skema/Alur)	Struktur Mikro (Elemen Tekstual)
Wacana Resmi Negara Sumber Setpres	Proklamasi kemenangan instan dan kontrol harga koersif pasca-panen raya.	Pengundangan kesuksesan sepihak untuk mematikan skeptisisme elite.	• Leksikon: “tonggak sejarah baru”, “surplus 3,52 juta ton”, “Bintang Jasa Utama”. • Imperatif: “Kalau harganya dinaikkan, langsung cabut izinnya.”
Media <i>Republika.co.id</i> Berita 1 Berita 2 Berita 3	Selebrasi kultural swasembada dan serangan balik terhadap oposisi.	Skema triumfalistik-defensi guna mengunci kebenaran makro pemerintah.	• Leksikon: “menumbukkan alu ke lesung”, “elite yang mengejek/sindir”, “beras khusus investor”. • Kognisi: Substitusi isu krisis via hilirisasi protein (MBG).
Media <i>Kompas.com</i> Berita 1 Berita 2 Berita 3	Dekonstruksi inflasi domestik dan alarm ekologis perubahan iklim.	Pemutusan hegemoni (<i>fractured hegemony</i>) lewat realitas meja makan rakyat.	• Leksikon: “swasembada tanpa ketahanan pangan”, “diskoneksi”, “El Nino Godzilla”. • Falsifikasi: “Beras Papua menembus Rp30.000–Rp60.000/kg.”
Media <i>Detik.com</i> Berita 1 Berita 2 Berita 3	Eksplorasi skandal impor via Kode HS dan relokasi kecemasan global.	Pembongkaran eufemisme bahasa negara lewat dokumen pabean internasional.	• Leksikon: “mengingkari swasembada”, “merembes ke pasaran”, “konflik Iran-Israel-AS”. • Teknis: Bukti administratif “Kode HS 100610 s.d. 100640”.

Kontestasi wacana memuncak saat negara merilis angka makro megah berupa “*surplus 3,52 juta ton.*” *Republika* mengamplifikasikannya secara triumfalistik melalui dramatisasi ritual dengan menyajikan peristiwa upacara “*menumbukkan alu ke dalam lesung*” dan serangan terhadap oposisi sebagai “*elite yang melempar sindiran.*” Secara konseptual, wacana triumfalistik dalam penelitian ini didefinisikan bukan sekadar ekspresi kebahasaan atas sebuah capaian, melainkan sebagai strategi ideologis penguasa (*ideological discourse strategy*) yang bertujuan menciptakan penutupan wacana (*discursive closure*). Gaya bahasa triumfalistik

dicirikan oleh penggunaan *logos* kuantitatif makro secara hiperbolis dan pembenturan polaritatif antara keberhasilan pemerintah dengan skeptisisme kritikus. Dalam sirkuit legitimasi, retorika triumfalistik berfungsi sebagai instrumen politik populis untuk membatasi ruang publik dari kritik teknokratis, sekaligus mengalihkan perhatian dari kerentanan material di tingkat bawah.

Hegemoni simbolik ini dipatahkan secara substantif oleh *Kompas* melalui pembongkaran diskoneksi kognitif penguasa bahwa realitas pasar membuktikan “*harga beras Papua menembus Rp30.000 hingga Rp60.000/kg*” di tengah ancaman ekologis “*El Nino Godzilla.*” Akhirnya, *Detik.com* membuktikan falsifikasi hilir secara radikal melalui pengungkapan aspek teknis dokumen pabean, menonjolkan “Kode HS 100610 hingga 100640” untuk membuktikan masuknya beras kasar impor dari Amerika Serikat, sebelum mengalihkan kecemasan publik dalam isu geopolitik perang “*Iran-Israel-AS.*”

Integrasi Kognisi Sosial dan Konteks Sosial: Dinamika Pertarungan Hegemoni

Penyusunan struktur teks dari ketiga media sepanjang periode 2024–2026 tidak terjadi di ruang hampa, melainkan merupakan manifestasi dari model mental redaksi (dimensi meso) yang beroperasi di dalam konstelasi politik riil Indonesia (dimensi makro). Menjawab pertanyaan penelitian pertama, data empiris menunjukkan bahwa rezim memanfaatkan strategi *populisme pangan* (*food populism*) yang mengidentikkan swasembada sebagai harga mati kemerdekaan nasional. Integrasi kedua dimensi ini memperlihatkan bahwa sirkuit legitimasi pangan tidak berjalan linier, melainkan mengalami pembelahan hegemoni (*fractured hegemony*).

Sinkronisasi Kognitif dan Institusionalisasi Kekuasaan (Poros Pemerintah–Republika)

Pada tingkat kognisi sosial, *Republika* menunjukkan model mental yang mengalami konvergensi total dengan wacana induk Kemensetneg. Ruang redaksi *Republika* memperlakukan isu swasembada pangan bukan sekadar komoditas jurnalistik, melainkan instrumen *national security* dan kebanggaan geopolitik yang wajib dilindungi. Karakteristik ini mengonfirmasi tesis Mudhoffir (2021) mengenai watak rezim populis di Indonesia yang cenderung melakukan sentralisasi wacana demi mengamankan kepatuhan massa.

Kondisi sosiokognitif ini berakar pada konteks makro berupa kedekatan struktural kepemilikan media dengan elite kabinet. Dampak makrososialnya terlihat jelas pada fase hilir (2026): *Republika* mengonstruksikan wacana meredam kritik oposisi melalui glorifikasi pemberian Bintang Jasa Utama kepada Menteri Pertanian. Ketika krisis geopolitik Timur Tengah memuncak, kognisi *Republika* secara memproduksi frasa “Indonesia Aman” sebagai strategi penenteraman publik (*reassurance*) untuk menutupi kerentanan impor bahan baku pertanian domestik. Fenomena ini sejalan dengan konsep “politik penenteraman” (*politics of reassurance*) dalam sirkuit legitimasi (Suchman, 1995) bahwa institusi yang terancam krisis memproduksi retorika keberhasilan absolut guna mempertahankan status quo.

Pragmatisme Pasar dan Ambiguitas Sekuritisasi (Poros Media Massa–Detik.com)

Detik.com mencerminkan kognisi jurnalisme daring populis yang *event-driven* (bergantung sepenuhnya pada riak peristiwa harian). Redaksi tidak memiliki jangkar ideologi tunggal untuk membela maupun menentang kekuasaan. Pada tingkat makro, hal ini melahirkan fungsi media sebagai “saluran ambigu.” Temuan ini mendukung studi McChesney (2015) yang menyatakan bahwa media komersial digital akan selalu membelah wacana demi mengejar nilai ekonomi klik (*clickbait economy*), bukan demi kepentingan edukasi deliberatif publik.

Ketika aparat keamanan memperluas fungsinya ke sektor agraria sipil (seperti terekam dalam Rapim TNI-Polri 2025 dan pengerahan gerakan tanam oleh Kapolri di Ogan Ilir 2026), kognisi *Detik.com* mengamplifikasinya sebagai bentuk efisiensi komando. Namun, karena redaksi juga tunduk pada logika pasar digital yang menyukai konflik, mereka seketika meloloskan diksi kontra-hegemoni milik KPA (“corak militeristik,” “petani jadi buruh”) dan judul provokatif (“RI Batal Swasembada?”) saat isu impor beras khusus AS mencuat. Akibatnya, secara kognitif *Detik.com* ikut melonggarkan baut-baut jangkar legitimasi yang dipasang Istana di tingkat tapak masyarakat.

Perlawanan Saintifik dan Dekonstruksi Etis (Poros Oposisi Tekno-Sains–Kompas)

Kompas secara konsisten sepanjang tiga fase mengoperasikan model mental berbasis jurnalisme deliberatif. Skema kognitif redaksi *Kompas* digerakkan oleh ideologi keberlanjutan lingkungan (*ecological sustainability*) dan keadilan spasial regional. Konsep ini menjadi tandingan langsung terhadap retorika swasembada populis pemerintah yang sering kali mengorbankan keberlanjutan ekologis demi output produksi jangka pendek (Borras Jr., 2020).

Dalam konteks makro, *Kompas* secara sadar mendesentralisasikan wacana dengan menunjuk kaum akademisi (UGM, IPB, BRIN) sebagai penentu definisi utama (*primary definers*) untuk meruntuhkan utopia politik swasembada kilat. Puncaknya pada fase hilir 2026, kognisi *Kompas* meluncurkan strategi falsifikasi riil yang memorak-porandakan klaim kemenangan Setneg. Dengan mengekspos kontras harga beras domestik yang meroket hingga Rp60.000/kg di Papua serta ancaman iklim ekstrem “El Nino Godzilla,” *Kompas* membuktikan secara sosiopolitik bahwa swasembada versi pemerintah barulah sebatas keberhasilan statistik-simbolik di atas kertas, bukan kedaulatan pangan yang riil di atas meja makan rakyat.

Mutasi Sirkuit Legitimasi dan Batasan Ekologis Kekuasaan

Bagian ini secara khusus menjawab bagian kedua dari rumusan masalah: *bagaimana narasi ‘jangkar legitimasi’ ini beroperasi untuk menjustifikasi janji swasembada yang secara empiris bertentangan dengan data dan analisis pakar dalam sepuluh tahun terakhir*. Klaim triumphalistik rezim pada awal tahun 2026 bahwa target swasembada pangan empat tahun berhasil dituntaskan hanya dalam waktu satu tahun merupakan sebuah bentuk penyederhanaan logika populis (*populist logical reductionism*) yang distortif. Dalam paradigma ekonomi politik pangan, capaian ini bukanlah indikator keberhasilan struktural yang fundamental, melainkan hasil dari strategi penyempitan

makna (*discursive narrowing*). Rezim secara sepihak menyamakan “Ketahanan Pangan” (*Food Security*) — yang menurut Organisasi Pangan Dunia (FAO) wajib mencakup empat pilar: ketersediaan, keterjangkauan akses, pemanfaatan gizi, dan stabilitas pasokan sepanjang waktu — menjadi sekadar “Swasembada Beras” (*Rice Self-Sufficiency*) yang berbasis pada kuantitas stok di gudang Bulog.

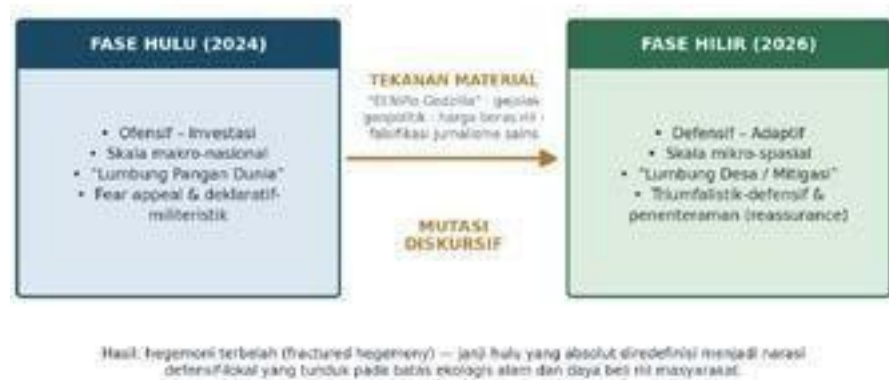
Penyederhanaan ini sengaja diproduksi oleh elite kekuasaan untuk menciptakan kesan keberhasilan kilat (*instant success effect*) yang menjadi karakteristik utama politik populisme. Sebagaimana dikemukakan oleh Mudhoffir (2021), pemimpin populis membutuhkan kemenangan-kemenangan diskursif yang dramatis untuk mempertahankan afeksi massa dan menghindarkan skeptisisme kaum teknokrat. Dengan mematok indikator kesuksesan hanya pada angka produksi beras makro (34,71 juta ton) dan penghentian impor beras konsumsi, pemerintah mengklaim telah mewujudkan kemandirian nasional mutlak.

Melalui penyederhanaan logika populis tersebut, janji hulu rezim awalnya dikemas untuk menjustifikasi keabsahan percepatan program di mata publik. Namun, ketika berhadapan dengan realitas yaitu kemungkinan adanya anomali iklim global (El Nino Godzilla) dan gejolak geopolitik dunia yang mulai mengganggu rantai pasok pupuk di awal tahun 2026, maka logika populis tersebut tereduksi semakin tampak dalam realitas. Realitas yang dihadapi itulah mendorong terjadinya Mutasi Diskursif (Redefinisi Janji Hulu) bahwa jargon ofensif berskala makronasional berubah menjadi narasi defensif berbasis mikrospasial lumbung desa. Jembatan diskursif inilah yang memperlihatkan bagaimana pergeseran legitimasi swasembada mengalami penyesuaian (dekonstruksi) ketika berhadapan dengan realitas sosial di tingkat bawah.

Dalam satu dekade terakhir, literatur ekonomi politik pangan di Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa proyeksi swasembada berskala besar seperti *Food Estate* selalu berujung pada kegagalan struktural, deforestasi, dan pemiskinan petani lokal (Santosa, 2021; Davidson, 2018). Janji swasembada cepat yang digelorkan oleh rezim sejak akhir 2024 merupakan bentuk pengabaian sistemik (*systemic omission*) terhadap kalkulasi teknokratis dan batasan agro-klimatologi yang telah diperingatkan oleh para ahli. Rezim menggunakan retorika populis swasembada untuk menutupi ketidaksesuaian material tersebut, menciptakan apa yang disebut Van Dijk (2015) sebagai manipulasi wacana berbasis elite.

Selain itu, modifikasi diskursif yang dilakukan rezim kemungkinan karena jurnalisme sains (*Kompas*) secara terus-menerus memberikan data kontras harga pangan dan ancaman El Nino, sehingga menggerus kemurnian hegemoni rezim di tingkat publik. Penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan baru (mengisi *blank spot* teoretis) bahwa sirkuit legitimasi politik pangan dalam era ekokrisis global tidak lagi bersifat absolut satu arah. Kekuasaan populis, sekuat apa pun struktur medianya, pada akhirnya terpaksa melakukan akomodasi diskursif dan tunduk pada dua batasan fundamental: batasan ekologis alam (*ecological boundaries*) serta batasan daya beli riil masyarakat di tingkat bawah.

Mutasi Diskursif: Restrukturisasi Janji Politik Pangan (2024-2026)



Gambar 2. Skema mutasi diskursif janji politik pangan, menggantikan diagram pra-format teks (diolah penulis).

Keabsahan dan mutu penelitian kritis (*goodness of quality research*) dibuktikan secara teoretis melalui kepatuhan pada prinsip kesesuaian keberadaan historis atau *historical situatedness* (Guba, Egon G and Lincoln, 2005). Seluruh teks dalam sirkuit legitimasi pangan periode 2024–2026 strukturnya merupakan manifestasi langsung dari kontradiksi internal kapitalisme agraria internasional di era antroposen. Dinamika kebahasaan dari ketiga fase yang diteliti secara ajek merekam pergeseran struktural global tersebut: mulai dari fase hulu berupa pemanfaatan retorika populis swasembada sebagai instrumen penjinakan krisis (*crisis management*) negara perifer dalam menghadapi fragmentasi geo-ekonomi pasca-pandemi; berlanjut ke fase operasional bahwa polarisasi media mengekspos retakan wacana akibat perluasan fungsi aparat keamanan demi memuluskan korporatisasi pangan monokultur yang mencerminkan watak “akumulasi melalui perampasan” (*accumulation by dispossession*) di wilayah perbatasan agraria (Harvey, 2003); hingga memuncak pada fase hilir berupa benturan frontal antara klaim selebrasi triumfalistik negara dengan falsifikasi media tandingan atas isu “El Nino Godzilla” dan ketergantungan impor resiprokal. Kontestasi diskursif ini secara empiris membuktikan tesis Moore (2015) mengenai batas ekologis kapitalisme (*the limits to capital*), sirkuit legitimasi kekuasaan populis lokal pada akhirnya runtuh dan terpaksa mengalami mutasi wacana ketika berhadapan dengan dua struktur raksasa global yang tidak dapat dimanipulasi oleh retorika bahasa, yaitu hukum anarki pasar dunia dan hukum kerusakan alam akibat ekosida global.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa anatomi sirkuit legitimasi politik pangan rezim Prabowo Subianto dalam kurun waktu 2024–2026 bergerak secara dinamis melalui tiga fase perkembangan diskursif yang saling berkontestasi. Menjawab rumusan masalah pertama mengenai konstruksi retorika populis, ditemukan bahwa pada fase hulu rezim secara sengaja membangun hegemoni kekuasaan menggunakan strategi *fear appeal* atas ancaman krisis global

dan bahasa deklaratif-militaristik. Retorika ketahanan pangan dikonstruksikan secara populis dengan menyamakan kedaulatan negara secara mutlak dengan pemenuhan kuantitas fisik di gudang-gudang negara bahwa jargon makro-nasional dieksploitasi untuk mematikan nalar kritis publik dan mengamankan kepatuhan massa di awal kekuasaan.

Selanjutnya, berkaitan dengan rumusan masalah kedua mengenai pengoperasian narasi jangkar legitimasi yang bertentangan dengan data pakar, penelitian ini membuktikan bahwa klaim janji akselerasi swasembada dari empat tahun menjadi satu tahun merupakan hasil dari strategi penyempitan makna (*discursive narrowing*) dan penyederhanaan logika populis yang distortif. Rezim secara sepihak menyederhanakan kompleksitas pilar ketahanan pangan multidimensional menjadi sekadar swasembada beras statistik berskala makro. Jangkar legitimasi ini dioperasikan di tingkat suprastruktur media terafiliasi kabinet melalui narasi *triumfalistik-defensif*, termasuk komodifikasi semiotik ritual tradisional “pukul lesung” sebagai tameng kultural untuk membentengi kinerja kementerian sekaligus mengalihkan skeptisisme ilmiah para pengkritik politik.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan baru yang mengisi kekosongan (*blank spot*) dalam literatur analisis wacana kritis ekonomi politik pangan di Indonesia. Jika studi terdahulu cenderung memandang proyek pangan skala besar negara selalu berhasil memaksakan legitimasinya secara mutlak ke tingkat bawah melalui koersi birokrasi, penelitian ini justru menemukan adanya fenomena mutasi diskursif berupa redefinisi janji hulu. Ketika benturan material berupa anomali iklim ekstrem “El Nino Godzilla” dan krisis geopolitik internasional menginterupsi stabilitas harga, jurnalisme sains deliberatif berhasil memfalsifikasi klaim selebrasi negara dengan menyodorkan realitas empiris atas meroketnya harga beras riil di pedalaman Papua serta kebocoran impor beras khusus yang diekspos media digital.

Akibat perlawanan diskursif multi-media ini, hegemoni rezim mengalami pembelahan (*fractured hegemony*), yaitu rezim melunakkan retorika ofensif makro-nasionalnya di hulu menjadi narasi defensif-adaptif berbasis mikrosposial, seperti konsep lumbung desa dan mitigasi lokal. Temuan ini melahirkan tesis baru dalam kajian wacana kritis bahwa kekuasaan populis, sekuat apa pun struktur medianya, pada akhirnya terpaksa melakukan akomodasi diskursif dan tunduk pada dua batasan fundamental, yaitu batasan ekologis alam serta batasan daya beli riil masyarakat di tingkat bawah. Retorika populis akan menghasilkan performa positif apabila secara bertahap dapat menunjukkan bukti-bukti empiris yang menegasi para pengkritik. Artinya, temuan analisis adanya mutasi diskursif, masih merupakan indikasi awal karena baru satu tahun, masih perlu waktu untuk pembuktikannya, apakah swasembada beras akan diikuti oleh swasembada pangan lainnya dan apakah masyarakat akan tepenuhi kebutuhan pangannya secara berkesinambungan.

Berdasarkan keterbatasan ruang lingkup dalam penelitian utama ini, diajukan beberapa saran akademis bagi pengembangan agenda riset masa depan. Agenda penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan ekspansi korpus teks lapangan hingga ke tingkat lokal-regional,

khususnya media daerah di wilayah pusat sengketa lahan, guna menangkap benturan diskursif yang lebih spesifik dan kontekstual. Demikian juga *time frame* penelitian pada fase hilir perlu diperpanjang, sirkuit legitimasi ini baru dua tahun setelah jangkar dipancang, penelitian perlu dilanjutkan dalam waktu lebih panjang sampai 5 atau 10 tahun. Selain itu, peneliti masa depan juga perlu melangkah pada analisis penerimaan khalayak (*audience reception analysis*) untuk menguji secara empiris bagaimana teks triumfalistik pemerintah maupun teks falsifikasi media didekode oleh komunitas petani dan masyarakat adat di tingkat bawah. Terakhir, pengembangan penelitian ke dalam ranah studi komparatif multimoda pada platform media sosial populer sangat direkomendasikan untuk membongkar bagaimana estetika visual populisme pangan dikemas secara digital guna menyasar demografi generasi muda.

ORCID ID

Asrul M Mustaqim  <https://orcid.org/0009-0003-8387-7798>

Enny Suryanjari  <https://orcid.org/0009-0006-9453-7010>

Linda Rahmah Yulianti  <https://orcid.org/0009-0003-4450-0322>

Mieke Suharini  <https://orcid.org/0009-0008-7875-8678>

Silvana Indriani Putri  <https://orcid.org/0009-0003-2169-8655>

Daftar Pustaka

- Belton, B., Allison, E. H., & Huque, S. I. (2020). Rajat's world: Narratives of food system transformation in Bangladesh. *Journal of Peasant Studies*, 47(7), 1362–1385. <https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1813919>
- Borras Jr., S. M. (2020). Agrarian social movements: The alterations of politicizing food sovereignty. *The Journal of Peasant Studies*, 47(7), 1395–1421. <https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1803839>
- BPS. (2024). *Luas panen dan produksi padi di Indonesia 2023 (angka tetap)*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Canovan, M. (1981). *Populism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Canovan, M. (2005). *The people*. Polity Press.
- Castells, M. (2017). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age* (2nd ed.). Polity Press.
- Clapp, J., & Moseley, W. G. (2020). Food and agricultural statecraft in an era of globalization. *World Development*, 134, 105022. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105022>
- Davidson, J. S. (2018). Indonesia's rice policy and the politics of food sovereignty. *Journal of Contemporary Asia*, 48(1), 103–123. <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1374320>
- Fadhli, A., & Siregar, H. (2023). Tantangan struktural swasembada pangan di Indonesia: Analisis kritis kebijakan agrikultur. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 145–160.
- Fuchs, C. (2021). *Social media: A critical introduction* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Guba, Egon G and Lincoln, Y. S. (2005). Contradiction, and Emerging Confluences. In Y. s

- Denzin, Norman and Lincoln (Ed.), *The Handbook of Qualitative Research* (3rd editio). Sage Publication.
- Habermas, J. (2016). *The theory of communicative action: Reason and the rationalization of society* (Vol. 1). Polity Press.
- Hall, S. (Ed.). (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage.
- Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford University Press.
- Hidayat, A. S. (2022). Evaluasi efisiensi mekanisasi pertanian dalam pencapaian swasembada pangan berkelanjutan. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 10(1), 88–102.
- INDEF. (2024). *Tinjauan ekonomi: Tantangan pangan di era transisi kepemimpinan*. Institute for Development of Economics and Finance.
- Johnson, R. (1986). What is cultural studies anyway? *Social Text*, 16, 38–80. <https://doi.org/10.2307/466285>
- Kurnia, D., Santosa, I., & Wijaya, A. (2022). Kegagalan Food Estate dan dampaknya terhadap ketahanan ekologis: Sebuah tinjauan kritis. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(1), 45–58.
- Kurniawan, N. I., Wardhana, A., & Purnomo, E. P. (2023). Hegemony and land grabbing: A critical analysis of the food estate policy in Indonesia. *Journal of Political Ecology*, 30(1), 210–228.
- Laclau, E. (2005). *On populist reason*. Verso.
- Li, T. M. (2014). *Land's end: Capitalist relations on an indigenous frontier*. Duke University Press.
- Lounela, A. (2021). The state and the food frontier: Nationalizing food security and the politics of land in Indonesia. *Human Ecology*, 49(3), 321–333.
- McChesney, R. W. (2015). *Rich media, poor democracy: Communication politics in dubious times*. New York University Press.
- McMichael, P. (2016). *Food regimes and agrarian questions*. Fernwood Publishing.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). *Populism: A very short introduction*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/actrade/9780190234874.001.0001>
- Mudhoffir, A. M. (2021). Populism and the struggle over oligarchic power in contemporary Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 51(3), 485–508. <https://doi.org/10.1080/00472336.2020.1764421>
- Neilson, J., & Wright, J. (2023). *The political economy of food sovereignty in Southeast Asia: Agribusiness, states, and peasants*. Routledge.
- Moore, J. W. (2015). *Capitalism in the web of life: Ecology and the accumulation of capital*. Verso Books.
- Pasaribu, S. M. (2023). Strategi pengendalian konversi lahan sawah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 15–32.
- Prabowo, S. (2024). *Pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029*. Sekretariat Negara.
- Pratt, J. (2021). Gramsci and the politics of food: Hegemony, common sense, and the struggle for sustainability. *Journal of Rural Studies*, 82, 450–459. <https://doi.org/10.1016/j>

- Rusono, N., dkk. (2021). *Analisis kebijakan subsidi pupuk dan dampaknya terhadap produksi padi*. Bappenas Working Paper Series.
- Santosa, D. A. (2021). *Politik pangan nasional: Antara utopia swasembada dan realitas impor*. IPB Press.
- Sari, P. K., & Winarno, B. (2022). Ketahanan pangan dan stabilitas politik: Evaluasi kebijakan rezim pasca-reformasi. *Jurnal Politik Indonesia*, 8(2), 112–130.
- Scoones, I., Edelman, M., Borras, S. M., Hall, R., Wolford, W., & White, B. (2018). Emancipatory rural politics: Confronting authoritarian populism. *The Journal of Peasant Studies*, 45(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1339693>
- Scoones, I., Stirling, A., Thompson, J., & Newell, P. (2022). *The politics of green transformations*. Routledge.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2014). *Mediating the message in the 21st century: A media sociology perspective*. Routledge.
- Suryana, A. (2022). *Menuju ketahanan pangan nasional berkelanjutan: Tantangan ekologis dan distribusi spasial*. Pustaka Utama.
- Van Dijk, T. A. (2015). Critical discourse analysis. In D. Tannen, H. E. Hamilton, & D. Schiffrin (Eds.), *The handbook of discourse analysis* (2nd ed., pp. 466–485). Wiley-Blackwell.
- Van Dijk, T. A. (2016). *Discourse and knowledge: A sociocognitive approach*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316146934>
- Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2016). *Methods of critical discourse studies* (3rd ed.). SAGE Publications.